

ABSTRAK

Perkembangan kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas (PT) oleh investor asing tunduk pada ketentuan Daftar Negatif Indonesia (DNI). Pembatasan kepemilikan saham dalam DNI tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep *nominee* dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam bentuk *nominee arrangement*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan penerapan praktik *nominee arrangement* di Indonesia dan akibat hukum kepemilikan saham *nominee arrangement* dalam PT terhadap *nominee*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam DNI tentunya menyebabkan investor asing tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan bentuk-bentuk praktik *nominee* baru, antara lain perkembangan diawali dengan praktik *nominee agreement* (perjanjian *nominee*) yang membuat perjanjian/pernyataan bahwa kepemilikan saham adalah untuk dan atas nama orang lain dan perkembangan tersebut menjadi praktik *nominee arrangement* (skema *nominee*) yang sudah tidak lagi membuat perjanjian *nominee* guna menghindari Pasal 33 ayat (1) UUPM. Akibat hukum bagi perjanjian tersebut ialah batal demi hukum sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUPM dan Pasal 48 ayat (1) UUPT, sehingga bagi pihak *nominee* perjanjian tersebut akan mengakibatkan tidak akan pernah terjadinya suatu perjanjian serta *nominee* sebagaimana yang tercatat sah (legal owner) sebagai Daftar Pemegang Saham yang dapat menerima hak dan menjalankan kewajiban dalam suatu PT.

Kata Kunci : *Nominee Arrangement, Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, Perjanjian*